
KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DAN MALAYSIA MENGHADAPI PANDEMI COVID-19

Mariane O. Delanova^{1*}, Yanyan M Yani²

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Jenderal Achmad Yani

²Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran

Email : delanovamariane@gmail.com; yan2m@hotmail.com.

*Korespondensi : delanovamariane@gmail.com

(Submission 11-11-2021, Revisions 16-11-2021, Accepted 17-11-2021)

Abstract

Foreign policy is the foundation of international relations. The spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) is a serious distraction for many countries in the world. The situation of urgency makes multilateralism that has been built to experience a weakening caused by nationalist and populist idea from public in each country who are trying to ensure their safety. This article is prepared to answer basic questions regarding foreign policy as a guide for state action in dealing with the pandemic. Author sees that dichotomy between high and middle-income countries seems to be the right thing when we see that the pandemic conditions indicate that the economic and health impacts will spread quickly to low- and middle-income countries, where systems and resources are less prepared to respond appropriately. This article, which was compiled by applying qualitative research methods and literature study, will identify how two countries that are classified as middle-income countries in Southeast Asia, namely Indonesia and Malaysia, propose and created a number of foreign policies to make up for their weaknesses and lack of resources as a way for both countries to re-track on the development agenda that was planned before global health issues that created distrust of institutions, authorities, and even international elites occurred.

Keywords: *foreign policy, middle income countries, pandemic, Indonesia, Malaysia.*

Abstrak

Politik luar negeri adalah dasar dari hubungan internasional. Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menjadi gangguan serius bagi banyak negara di dunia. Situasi urgensi tersebut membuat multilateralisme yang telah dibangun mengalami pelemahan yang disebabkan oleh ide-ide nasionalis dan populis dari masyarakat di masing-masing negara yang berusaha menjamin keselamatannya. Artikel ini disusun untuk menjawab pertanyaan mendasar mengenai politik luar negeri sebagai pedoman tindakan negara dalam menghadapi pandemi. Penulis melihat bahwa dikotomi antara negara-negara berpenghasilan tinggi dan menengah tampaknya menjadi hal yang tepat ketika kita melihat bahwa kondisi pandemi menunjukkan bahwa dampak ekonomi dan kesehatan akan menyebar dengan cepat ke negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, di mana sistem dan sumber daya kurang siap untuk merespon dengan tepat. Artikel ini disusun dengan menerapkan metode penelitian kualitatif dengan studi literatur untuk mengidentifikasi bagaimana dua negara yang tergolong

negara berpenghasilan menengah di Asia Tenggara, yaitu Indonesia dan Malaysia, dalam menyusun dan membuat sejumlah kebijakan luar negeri untuk mengatasi persoalan dan kekurangan sumber daya kedua negara tersebut, dalam mencari cara menyusun ulang agenda pembangunan yang telah direncanakan sebelum terjadinya krisis kesehatan global yang menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi, otoritas, dan bahkan elit internasional.

Kata Kunci: kebijakan luar negeri, negara-negara berpenghasilan menengah, pandemi, Indonesia, Malaysia.

PENDAHULUAN

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) telah menjadi fenomena yang mendistraksi fokus dari banyak negara di dunia dan menciptakan krisis global di abad ini. Bukan hanya menimbulkan isu pada persoalan kesehatan, namun juga mempengaruhi mata pencaharian di banyak negara secara hampir bersamaan. Perekonomian global yang sebenarnya dependen terhadap Tiongkok, sebagai negara yang pertama kali mendeteksi munculnya virus tersebut, mengalami pukulan berat. Sektor perdagangan yang bergantung pada mobilitas tinggi dari masyarakat dunia, juga sektor pariwisata yang terus berkembang setiap tahunnya memunculkan kondisi yang menuntut negara-negara untuk memproteksi warga negara mereka (Woetzel, et al., 2019; Moisescu, 2016).

Masalah kesehatan masyarakat dalam hubungan internasional makin riskan terhadap risiko. Muncul ancaman penularan dan keamanan, sehingga kebijakan luar negeri setiap negara semakin bersifat antisipatif, terutama dengan terus memperhatikan aspek-aspek yang erat kaitannya dengan keamanan kesehatan. Multilateralisme yang terjalin panjang mulai mengalami pelemahan akibat arus nasionalis dan populis di masyarakat masing-masing negara. Penduduk dunia yang sepenuhnya telah terhubung melalui jaringan internet juga tidak jarang memperoleh informasi yang bias, sehingga ketidakpercayaan terhadap lembaga, otoritas, bahkan elit internasional mulai nampak secara jelas. Informasi seputar Covid-19, mulai dari pencegahan dan pengobatan, *update* situasi, tindakan dan kebijakan otoritas nasional maupun internasional, informasi penyakit, dan konspirasi terus bermunculan dan menjadi bahan bakar dari skeptisme terhadap multilateralisme yang ada (Lu, 2020).

Dengan kondisi demikian, wajar saja jika virus berkembang semakin subur dan menjangkit negara-negara di dunia dengan kecepatan yang tinggi. Dalam menggambarkan hal ini, Sekjen Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres menyatakan secara terbuka bahwa pandemi yang terjadi merupakan krisis paling menantang yang dihadapi dunia sejak Perang Dunia Kedua. Guterres juga menyatakan bahwa jutaan orang di dunia ketakutan dan mencari arahan yang jelas tentang cara terbaik untuk melindungi diri mereka sendiri dan keluarga mereka di tengah banyak informasi salah dan teori konspirasi liar yang menginfeksi internet, yang akhirnya melahirkan kebencian, stigmatisasi dan eksklusi kepada sebagian orang dan kelompok (Adelson, 2020).

Kebijakan luar negeri adalah instrumen penting negara dalam mencapai kepentingan nasional yang dimiliki, serta menjadi dasar dari setiap interaksinya dengan negara lain dalam hubungan internasional. Banyak pihak menganggap

bahwa dunia harus bersatu melawan Covid-19, dengan berbekal kepercayaan satu sama lain. Akan tetapi, pandemi Covid-19 justru memaksa negara-negara untuk mengambil tindakan *self-help* yang kemudian memperburuk guncangan negatif jangka pendek terhadap kondisi perekonomian dunia karena memang kepercayaan antar negara belum benar-benar mengakar. Covid-19 seolah menunjukkan bahwa sistem politik dunia dan kepemimpinan dari negara *great powers*, memiliki banyak keterbatasan dalam menangani kondisi darurat yang ada (Grint, 2020), sehingga langkah kolektif yang diperlukan dapat dianggap tidak dilakukan guna memenuhi tuntutan kebutuhan dari masing-masing negara untuk menjamin stabilitas nasional pada negara-negara itu sendiri.

Munculnya dikotomi antara negara dengan pendapatan tinggi atau menengah, menjadi sesuatu yang tepat karena kondisi pandemi menunjukkan bahwa dampak ekonomi dan kesehatan menyebar dengan cepat ke negara-negara dengan tingkat pendapatan yang rendah dan menengah, di mana sistem dan sumber daya kurang siap untuk merespons dengan tepat (Beteringhe, Pieptea, Arsith, & Stanciu, 2020, p. 251). Beberapa pemerhati ekomi dunia memprediksi bahwa kombinasi yang mengakibatkan guncangan pada kurva penawaran dan permintaan yang negatif dari Covid-19, akan memunculkan *spillover effect* yang serupa dengan krisis keuangan global (Markwat, Kole, & Van Dijk, 2009). Di sinilah peran hubungan internasional menjadi sangat penting bagi negara-negara di dunia.

Hubungan untuk menjamin adanya sistem perlindungan sosial yang membuat negara-negara berkembang yang terkena dampak Covid-19 perlu untuk memaksimalkan hubungan yang mereka miliki dengan negara lainnya, khususnya negara yang secara kapasitas lebih siap dalam menghadapi pandemi. Hasil dari kebijakan luar itulah yang kemudian diharapkan mampu membantu segala bentuk bantuan sosial dan langkah-langkah perlindungan lain bagi warga negaranya, khususnya masyarakat yang paling rentan.

Negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi seperti Amerika Serikat (AS), terlihat menghadapi risiko ekonomi yang lebih rendah mengingat sektor kesehatan mereka yang lebih baik dari negara lainnya. Namun tetap saja mitigasi ekonomi diperlukan untuk menghindari krisis yang mengintai. Negara-negara di dunia perlu untuk memahami bahwa terpenuhinya kondisi kesehatan yang layak akan membantu pemerintahan mereka dalam mencapai stabilitas ekonomi, sehingga interdependensi yang telah dijalin dalam interaksi antarnegara menempatkan hubungan internasional yang stabil menjadi bagian dari kebutuhan negara mengingat resesi di negara berkembang memasuki resesi ke tahap yang lebih dalam, yang tentu akan berdampak pada negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, begitu pula sebaliknya.

Indonesia dan Malaysia, adalah dua negara yang tergolong ke dalam negara dengan pertumbuhan dan pendapatan ekonomi tinggi dan menengah yang dianggap serumpun. Dalam upaya untuk beradaptasi dengan tuntutan pemenuhan fungsinya dalam konteks domestik, baik melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti alat kesehatan dan vaksin guna mengatasi pandemi Covid-19, juga dituntut untuk mempertahankan hubungan dengan negara lain demi menjamin fungsi tersebut.

Kedua negara ini juga berusaha untuk menjadi yang terdepan dalam memulai kembali aktivitas ekonomi global (ISIS Malaysia, 2021) melalui diplomasi ekonomi (Kemlu RI, 2020) yang aktif, sebagai cara untuk mencapai *maximal profit or value* atau sebagai pilihan rasional, keduanya akan bergantung pada pendekatan dan sikap dari kedua negara tersebut dalam memaknai kondisi pandemi (Kahler, 1998, p. 919). Terlepas dari luas geografi dan demografi penduduk yang berbeda, kedua aspek tersebut (pendekatan dan sikap) akan menjadi faktor kunci yang menentukan negara mana yang akan mampu memaksimalkan kebijakan luar negeri yang dianggap sebagai fenomena mutasi yang konstan (Morin & Paquin, 2018, p. 23) untuk dapat segera keluar dari pandemi dan mengembalikan fokus kebijakan luar negeri kepada tujuan masing-masing negara untuk terus berkembang.

Studi ini berfokus pada pertanyaan bagaimana kedua negara tersebut bereaksi ketika dihadapkan pada kondisi yang nampaknya bukan hanya menciptakan kondisi yang melampaui *state of emergency* tersebut? Akankah kebijakan luar negeri yang diambil tanpa adanya persiapan matang dan secara mendadak dapat berjalan efektif di tengah kondisi multilateral yang mengalami degradasi? Pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebut diajukan untuk mengidentifikasi bagaimana formulasi kebijakan luar negeri dilakukan pada saat negara berada pada kondisi darurat akibat penyebaran penyakit menular atau pandemi yang memberikan dampak multidimensi, serta minimnya waktu dalam penentuan opsi kebijakan.

METODE

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan kualitatif merupakan suatu metode dalam memahami sebuah fenomena secara mendalam dengan menggunakan cara pengumpulan data yang juga dilakukan secara mendalam. Fokus dari penelitian yakni gejala yang terdapat pada kehidupan sosial yang dialami oleh manusia.

Bogdan dan Taylor memberikan definisi mengenai pendekatan kualitatif sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa perkataan dalam bentuk tertulis ataupun tulisan serta perilaku-perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dilakukan untuk lebih memahami secara mendalam mengenai bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia dan Malaysia dalam mengatasi pandemi Covid-19.

PEMBAHASAN

Untuk dapat mengetahui mengenai kebijakan luar negeri antara Indonesia dengan Malaysia di masa pandemi, hal itu bisa dilacak dengan mengungkap kembali fase awal terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia dan Malaysia. Covid-19 terlebih dahulu memasuki wilayah Malaysia pada 25 Januari 2020. Virus ini terdeteksi pada tiga warga negara Tiongkok yang sebelumnya memiliki kontak dekat dengan orang yang terinfeksi virus tersebut di Singapura. Tidak menunggu waktu lama, Menteri Kesehatan Datuk Seri Dr Dzulkefly Ahmad mengkonfirmasi bahwa ketiganya memang benar merupakan warga negara Tiongkok yang dikarantina di

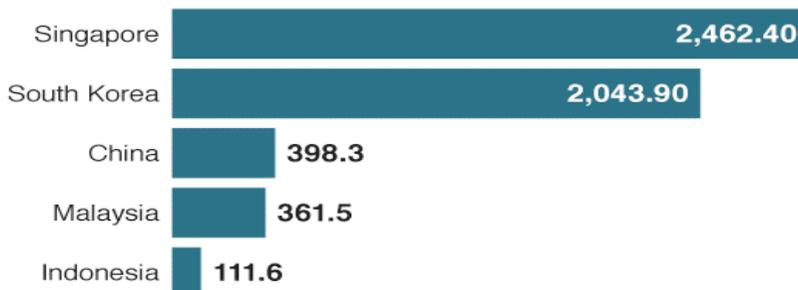
sebuah hotel Johor Baru dan akan segera dipindahkan ke Rumah Sakit Sungai Buloh untuk memperoleh perawatan lebih lanjut (Borneo Post, 2020).

Kesigapan dari pemerintah Malaysia dalam menghadapi masuknya virus Covid-19 sangat kontras dengan tanggapan Indonesia mengenai penularan di negara mereka. Negara Indonesia baru mengumumkan kasus pertama pada 2 Maret 2020 dengan respon yang kontras, yaitu dengan memberikan bantahan yang keras dari pemerintah terhadap Pandu Riono, seorang pakar epidemiologi Universitas Indonesia (UI) yang menyatakan bahwa sebenarnya virus tersebut telah masuk ke Indonesia sejak awal Januari (Pranita, 2020). Perbedaan ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia mengalami kebingungan dan ketidaksiapaan dalam menghadapi kondisi darurat yang terjadi.

Dalam menyikapi keadaan darurat yang ada, Menkes Malaysia tidak segan untuk langsung bertindak cepat dengan melarang warga mereka bepergian ke Tiongkok, memperketat lalu lintas masuk di pintu masuk Malaysia, dan melakukan repatriasi warga Malaysia yang berada di Hubei (Makarim, 2020). Malaysia juga kemudian membentuk Pusat Kesiapsiagaan Krisis dan Tanggap atau *Crisis Preparedness and Response Centre* (CPRC) di bawah Kementerian Kesehatan Malaysia jauh sebelum pengumuman WHO bahwa virus Covid-19 merupakan darurat kesehatan global (New Straits Times, 2020). Meskipun kebijakan demi kebijakan preventif telah diambil oleh negara tetangganya, pemerintahan Indonesia masih tetap membuka akses penerbangan langsung dari dan ke kota Wuhan yang merupakan pusat penyebaran virus saat itu. Bandara di beberapa kota di Indonesia, yakni di Batam, Jakarta, Denpasar, Manado, dan Makassar masih tetap terbuka. Indonesia melalui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bahkan menyatakan secara tegas bahwa kedatangan turis asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) tidak akan dibatasi (Basith, 2020), meskipun terdapat kebijakan penyesuaian, yaitu dengan melakukan pemeriksaan kesehatan di bandar udara, darat, dan pelabuhan dengan menggunakan alat pemindai suhu (Kemlu RI, 2020).

Money spent on health

per capita (US\$)



Gambar 1. Perbandingan Angka Belanja di Sektor Kesehatan Antarnegara
(Sumber: BBC.com)

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah Indonesia seolah memiliki keengganan untuk membuat kebijakan tegas, yang bukan tidak mungkin memberikan dampak negatif pada hubungan luar negeri yang dimiliki oleh Indonesia, padahal Indonesia sebagai negara terpadat keempat di dunia diprediksi sangat beresiko untuk terjebak dalam pandemi dalam jangka waktu yang lebih lama (Suryadarma, 2020), jika dibandingkan dengan negara-negara berpenduduk lebih sedikit lainnya, termasuk Malaysia. Belum lagi jika merujuk pada data bahwa kedua negara memang memiliki catatan rendah dalam mengalokasikan anggaran bagi sektor kesehatan.

Dalam belanja untuk sektor kesehatan, Gambar 1 menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi belanja kesehatan yang rendah. Ini menjadi salah satu indikator yang menunjukkan betapa rapuhnya infrastruktur kesehatan di Indonesia. Ditambah lagi, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Indonesia menunjukkan adanya konflik kepentingan antar lembaga pemerintahan (*inter-ministerial conflict*) dalam prosesnya. *Initial Reponses* terhadap pandemi dari pemerintahan Indonesia baru mulai ditetapkan pada akhir Maret 2020, atau selang 28 hari dari penemuan infeksi pertama di negara tersebut (Indonesia.go.id, 2020). Respon tersebut meliputi kebijakan luar negeri, di antaranya: 1) Pembentukan Tim Gerak Cepat (TGC) di wilayah otoritas pintu masuk negara di bandara/pelabuhan/pos lintas batas darat negara (PLBDN) yang mana membatasi kedatangan Warga Negara Asing (WNA); 2) mengembangkan pedoman kesiapsiagaan yang mengacu kepada pedoman sementara dari World Health Organization (WHO) dalam hal ini membuka jalur; 3) menyediakan akses logistik di Wuhan serta menyalurkan bantuan dana setara Rp 133 juta kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang sebagian besar merupakan mahasiswa di kota Wuhan; serta 4) membuka diplomasi kepada Tiongkok agar diperkenankan mengirimkan masker N-95 untuk WNI di RRT (Kemlu RI, 2020).

Dari sini sudah mulai terlihat jelas bahwa kebijakan luar negeri, sebagai produk kebijakan pemerintah yang berwenang di Indonesia terhadap lingkungan internasional sesuai nilai yang dipercayai (Webber & Smith, 2002: 11-12) yang dalam hal ini merujuk pada perlindungan WNI telah benar-benar diupayakan. Perkembangan tersebut juga menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 merupakan fenomena yang telah menunjukkan bagaimana tata kelola dan kebijakan pemerintah suatu negara bisa dilihat secara transparan. Pada situasi tersebut, Malaysia memberikan cerminan yang lebih sigap dan lugas terhadap ancaman kesehatan yang terjadi, sementara pemerintah Indonesia menunjukkan hal yang sebaliknya, yaitu kegagapan dan terjebak dalam penyangkalan atas tingkat urgensi maupun dampak Covid-19, sebelum akhirnya secara sistematis mengambil langkah yang dibutuhkan dalam menangani pandemi (Mas'udi & Winarti, 2020) baik di dalam negeri, maupun dengan aspek-aspek yang bersangkutan dengan hubungan luar negeri, seperti misalnya pemenuhan kebutuhan alat kesehatan (alkes). Kondisi ini juga menunjukkan betapa kemajuan teknologi dan fasilitas layanan kesehatan yang belum benar-benar mumpuni untuk menghadapi ancaman pandemi bagi kedua negara, membuat proses adaptasi dalam pembuatan kebijakan kedua negara bersifat *trial and error* (Khoerunisa & Noorikhshan, 2021). Kebijakan-kebijakan tersebut

juga berdampak pada tingkat kepercayaan baik dari publik domestik maupun internasional.

Lemahnya respon awal penanganan Covid-19 di Indonesia, menciptakan krisis komunikasi di berbagai daerah. Sehingga bukannya mendapatkan dukungan luas dari masyarakat seperti di Malaysia, pemerintah Indonesia malah menurunkan tingkat kepercayaan publik dimana lebih dari separuh masyarakat menunjukkan sentimen negatif kepada pemerintah, khususnya kepada Presiden dan Menkes. Padahal kepercayaan dari masyarakat merupakan fondasi dari komunikasi berbasis sains kepada masyarakat (Khoerunisa & Noorikhsan, 2021) yang kemudian akan menciptakan kebijakan-kebijakan yang memang berbasis pada data serta bukti-bukti yang telah ada dan secara efektif menunjukkan penyesuaian aktivitas negara dengan apa yang terjadi di lingkungan internasional (Modelski, 1962: 4).

• **Penanganan Pandemi**

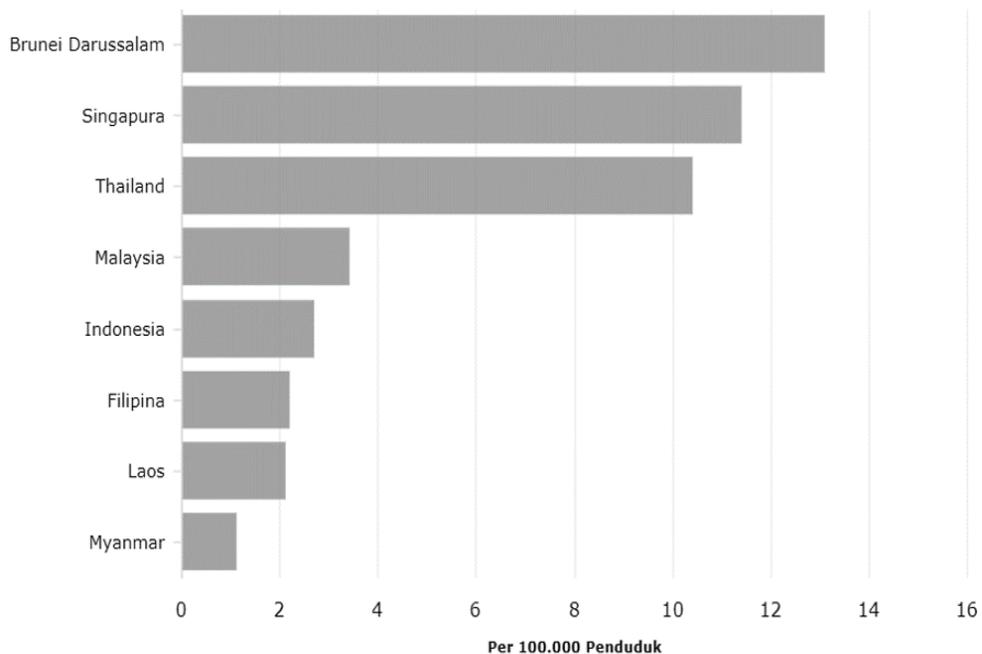
Penanganan Covid-19 dan dampaknya, membutuhkan kapasitas sumber daya manusia dan fasilitas kesehatan yang sangat besar. Pengerahan sumber daya dalam menangani wabah serta upaya untuk menyelamatkan ekonomi dan kehidupan masyarakat, tentu tidak akan pernah cukup apabila tidak ditunjang dengan fasilitas yang dibutuhkan dalam menekan laju penyebaran virus, menekan tingkat kematian atau fatalitas, dan penanganan pada orang yang terinfeksi. Dengan kondisi demikian maka solidaritas dan keterlibatan setiap negara untuk saling mendukung dalam menghadapi krisis dan lonjaka kasus Covid-19 harus dapat diwujudkan melalui upaya-upaya dukungan dengan saling mengirimkan bantuan berupa peralatan kesehatan, oksigen, obat-obatan, hingga vaksin (Limanseto, 2021). Ini merupakan suatu bentuk tindakan nyata yang didasarkan pada pemikiran liberalisme yang meyakini bahwa saling ketergantungan dapat memberikan insentif dari kebijakan yang terkoordinasi sehingga hasil yang setara bagi semua aktor yang berpartisipasi akan dapat tercapai (Moravcsik, 1997: 520-521).

Indonesia melakukan berbagai upaya agar penyebaran virus bisa ditekan semaksimal mungkin. Luasnya wilayah Indonesia, dengan jumlah populasi yang tidak sedikit membuat pandemi mengekspos rapuhnya rantai pasokan medis yang ada di negara kepulauan ini. Lonjakan jumlah pasien yang sempat terjadi juga menunjukkan bahwa kapasitas rawat inap tergolong rendah dan persediaan medis memang memiliki keterbatasan. Tenaga medis yang tersedia di Indonesia ternyata belum cukup untuk menangani potensi peningkatan kasus COVID-19. Pandemi yang membawa tantangan bagi SDM yang bekerja dalam sistem kesehatan negara, ditandai dengan rasio dokter-penduduk yang tidak memadai, ketidaksetaraan distribusi geografis dokter, dan kekurangan perawat yang signifikan (Legido-Quigley & Asgari-Jirhandeh, 2018). Lonjakan pasien yang membutuhkan rawat inap juga telah menyebabkan persediaan medis habis dan peningkatan signifikan atas peralatan medis yang persediannya terbatas seperti ventilator. Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas kesehatan seperti baju pelindung, masker N95, dan pelindung wajah di seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia juga terbilang minim. Kondisi ini menjadi lebih mengkhawatirkan mengingat kekurangan yang terjadi juga ditemukan

di rumah sakit yang menjadi rujukan bagi pasien terinfeksi Covid-19 (Yunus & Andarini, 2020).

Dalam menghadapi kelangkaan APD, yang bahkan membuat beberapa petugas kesehatan harus menggunakan kembali APD mereka, karena maraknya *panic buying* dan penimbunan perlengkapan seperti masker, *hand sanitizer*, dan sarung tangan berstandar medis oleh masyarakat juga minimnya ventilator yang tersedia, pemerintah Indonesia mengambil kebijakan luar negeri untuk meminta bantuan kepada pihak eksternal. Diantaranya adalah *Chief Executive Officer* (CEO) dari perusahaan multinasional Space X, Elon Musk agar bersedia memenuhi kebutuhan ventilator di Indonesia (Sudarwan, 2020). Di luar jalur diplomasi tersebut, Indonesia juga secara formal melakukan pendekatan kepada Amerika Serikat yang kala itu dipimpin oleh Presiden Donald J. Trump melalui dialog yang dilakukan oleh Presiden kedua negara guna mengadakan kerjasama mengenai pengadaan ventilator (Lumbanrau, 2020).

Tindakan ini mencerminkan bahwa memang kebijakan luar negeri suatu negara merupakan hasil dari interpretasi atau pemaknaan mereka kondisi yang terjadi secara internal (Alden & Aran, 2017). Tindakan-tindakan tersebut juga menjadi bukti nyata dari pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, bahwa diplomasi bekerja siang malam untuk memenuhi kebutuhan alat diagnostik dan terapeutik di awal pandemi (Kemlu.go.id, 2021). Belum lagi Indonesia juga menghadapi permasalahan menengenai kurangnya rasio tempat tidur *Intensive Care Unit* (ICU) di rumah sakit.



Gambar 2. Rasio Tempat Tidur ICU Rumah Sakit Per 100.000 Penduduk di Asia Tenggara (Sumber: Katadata.co.id).

Persoalan lain adalah sistem pasokan medis di Indonesia yang selama ini bergantung pada rantai pasokan global dimana pasokan masker wajah bergantung pada RRT dan mayoritas bahan aktif yang diperlukan untuk peracikan farmasi berasal dari RRT dan India (Burry, et al., 2020). Dengan demikian, dampak dari larangan bepergian, larangan ekspor, dan penutupan pabrik telah membebani rantai pasokan APD dari RRT secara signifikan (Park, et al., 2020). Kebijakan luar negeri Indonesia untuk menyasiasi permasalahan ini dilakukan dengan memperkuat kerja sama bilateral dengan beberapa negara, di antaranya dengan Korea Selatan yang secara langsung mempersiapkan bantuan kepada Indonesia berupa *test kits* dan *rechargeable battery power sprayers*, yang secara teknis dilaksanakan oleh Korea International Cooperation Agency (KOICA). Sementara, sebagai bagian dari sektor swasta Korsel, LG Group dan Hyundai Motor juga menyatakan komitmen mereka untuk memberikan sumbangan 50 ribu Covid-19 *diagnostic kit* (tipe RT-PCR) serta 40 ribu APD, kepada Indonesia (Setyowati, 2020).

Respons langsung dari Korea Selatan menjadi bukti bahwa keyakinan James N. Rosenau yang menyatakan bahwa fenomena yang terjadi dalam cakupan *eksternal*, yang dalam hal ini merujuk pada kondisi darurat yang dialami Indonesia, akan menjadi *input* yang mempengaruhi persepsi dari negara lain dalam mengkonversi politik luar negeri mereka sebagai sebuah *output* (Rosenau, 1980: 171-173). Meskipun, hal berbeda terjadi di Malaysia. Dengan respon Indonesia yang terkesan gagap, pemerintah Malaysia menghadapi kekhawatiran yang berkembang mengenai kemampuan sistem kesehatan dengan merespons secara cepat dan efektif kebutuhan pasien Covid-19 dengan sigap. Kekurangan pasokan medis, infrastruktur, dan pekerja perawatan kesehatan disiasati dengan mempersiapkan 926 unit ventilator di *Intensive Care Unit (ICU)*, 152 ventilator non-invasif, dan 142 ventilator transportasi, serta 634 unit cadangan yang ada di MOH (Hamzah, Yu, & See, 2020). Angka tersebut tentu terlihat lebih baik dibandingkan jumlah ventilator Indonesia yang berjumlah 29,9 ribu unit, namun terbagi dan di masing-masing wilayah belum dapat memenuhi angka 70% kebutuhan atas alat tersebut (Lidwina, 2020).

Malaysia menyadari bahwa tantangan kelangkaan sumber daya terutama selama pandemi membutuhkan reprioritas sumber daya untuk alokasi dan distribusi yang efektif di negara tersebut. Malaysia juga mendorong K-One Technology (KOT) untuk mempergunakan lisensi yang mereka miliki dan terus memproduksi serta mendistribusikan ventilator dari Laboratorium Propulsi Jet (*Jet Propulsion Laboratory's/JPL*) dengan mengusung program *Ventilator Intervention Technology Accessible Locally (VITAL)* milik *National Aeronautics and Space Administration (NASA)*. Kebijakan luar negeri ini berhasil mendorong KOT memperoleh lisensi non-eksklusif (NELA) untuk memproduksi dan mendistribusikan ventilator VITAL (MIDA, 2020).

Perbedaan langkah yang diambil oleh otoritas Malaysia dan Indonesia menunjukkan argumentasi bahwa lingkungan internal suatu negara akan mempengaruhi sifat dan arah kebijakan luar negeri mereka, sehingga setiap aspek yang membedakan negara seperti ukuran, perkembangan sosial ekonomi, dan rezim politik yang mendorong perbedaan dalam pelebagaan politik dan struktur

kemasyarakatan, kemampuan militer dan ekonomi, serta budaya strategis yang tertanam sebagai kendaraan dalam pembuatan kebijakan luar negeri dan keputusan kebijakan luar negeri (AS, 2018: 8) menjadi sesuatu yang valid. Kondisi ini menunjukkan pula bahwa keputusan Indonesia untuk tidak bertindak sama sekali di awal, besar kemungkinan disebabkan dari tidak tercapainya konsensus di antara para stakeholder kebijakan luar negeri. Terlebih jika berkaca pada sikap santai yang ditunjukkan oleh Menkes Indonesia saat itu, Terawan Agus Putranto dalam menghadapi ancaman pandemi (Adam, 2020), bertolak belakang dengan sikap siaga yang ditunjukkan Menkes Malaysia. Tidak mengherankan jika pemerintah Indonesia di awal hanya fokus pada dampak ekonomi, daripada mempersiapkan mitigasi atas isu kesehatan yang mungkin terjadi.

Dari gambaran tersebut tidak mengherankan jika WHO memuji kinerja dari Malaysia, yang membuka peluang bagi Kantor Perwakilan mereka untuk bekerja sama dengan MOH Malaysia guna menyediakan dukungan kritis di bidang koordinasi mitra, informasi dan perencanaan, keahlian teknis, dukungan operasional dan logistik. WHO bahkan menyediakan alat tes awal sebelum tersedia secara komersial dan menyediakan protokol tes untuk diagnosis Covid-19 di Malaysia pada bulan Maret 2020. WHO juga mendukung upaya MOH Malaysia untuk memvisualisasikan dan menentukan tujuan jangka panjang dalam merespon pandemi secara berkelanjutan. Peran WHO juga mencakup arahan untuk memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pencegahan di Malaysia (Ariyanti, 2020).

Dari sini dapat terlihat bahwa kebijakan Malaysia yang memilih untuk lebih terbuka pada bantuan teknis yang ditawarkan oleh WHO, bukan hanya meringankan beban mereka dalam upaya mitigasi pandemi, namun juga benar-benar membantu dalam penyusunan rencana jangka panjang dalam penanganan pandemi di negara tersebut. Kebijakan untuk membuka secara luas kerjasama dengan WHO juga menjadi jalan yang tepat dalam memperkuat sistem kesehatan yang dimiliki. Ini berbeda dengan di Indonesia, dimana kelangkaan global alat kesehatan dan bahan farmasi selama pandemi mendorong Indonesia untuk terus menekankan diplomasi ekonomi yang bertujuan untuk mengembangkan akses yang lebih aman ke bahan baku, manufaktur berteknologi rendah hingga menengah, dan sumber daya manusia. Tercatat bahwa Indonesia berkolaborasi dengan negara-negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi, termasuk Jepang dan Korea Selatan, dalam produksi bersama untuk meningkatkan pasokan global alat pelindung diri (APD) dan produk lain yang dibutuhkan untuk Covid-19.

Hingga akhir tahun 2020, Indonesia masih menjadi pemasok masker, APD lainnya, dan alat tes cepat ke sembilan negara, sepuluh organisasi internasional, dan delapan puluh dua Lembaga Swadaya Masyarakat (Fitriani, 2021). Capaian ini tentu menunjukkan bahwa ekonomi tetap menjadi pusat dari setiap manuver yang dilakukan oleh Indonesia di kancah internasional. Belum lagi jika kita melihat inovasi Indonesia untuk menggerakkan kegiatan ekonomi lintas batas melalui kebijakan *Travel Corridor Arrangements* (TCA) yang mengoordinasikan aktivitas bilateral antara negara-negara tertentu, termasuk Uni Emirat Arab, RRT, Korea Selatan (Kemlu RI, 2020), dan Singapura (Jelita, 2020). Kebijakan ini membuka

lebar kemungkinan untuk pekerja asing, pebisnis, dan perwakilan negara untuk tetap melakukan perjalanan antar negara lagi-lagi demi menjamin stabilitas perekonomian yang sebenarnya beresiko karena varian baru dari Covid-19 masih terus berkembang.

- **Vaksinasi**

Vaksin merupakan salah satu cara untuk dapat mengurangi resiko penularan virus Covid-19. Namun, tantangan beratnya adalah mobilitas manusia yang tergolong tinggi, diperparah dengan berkembangnya pemahaman populis mengenai nasionalisme dan sikap anti-science yang jelas terlihat pada masyarakat, khususnya di Indonesia. Hal ini menciptakan situasi dimana langkah politik dan kebijakan yang ditetapkan berorientasi pada popularitas jangka pendek yang menunjang terpenuhinya kepentingan yang ditujukan bagi kekuasaan (Kluth, 2020). Karakter pandemi ini dijadikan komoditas politik personal atau kelompok, dengan mengorbankan esensi kemanusiaan yang seharusnya dikedepankan sehingga keharusan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan rasional yang bersifat jangka panjang menjadi tidak terpenuhi, begitu pula berkaitan dengan upaya kebijakan luar negeri yang ditetapkan sebagai cara untuk memenuhi penyediaan vaksin.

Kebijakan luar negeri Malaysia dalam penyediaan vaksin dilakukan oleh MOH dan Kementerian Sains, Teknologi, dan Inovasi Malaysia (*Ministry of Science, Technology, and Innovation/MOSTY*) melalui kerjasama dengan RRT dalam pengembangan vaksin yang aman dan manjur. Kesepakatan tersebut bertujuan untuk menjalin kerja sama yang lebih besar antara kedua negara dalam memerangi pandemi Covid-19. Perjanjian yang ditandatangani oleh Menteri Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi, YB Khairy Jamaluddin dan perwakilan RRT, HE Wang Zhigang, melalui pertemuan virtual. Dalam perjanjian juga memuat kegiatan yang akan diawasi oleh Komite Tingkat Tinggi, yang akan diketuai oleh kedua Menteri Luar Negeri; YB Dato' Seri Hishammuddin Tun Hussein, Menteri Luar Negeri Malaysia; dan HE Wang Yi, sebagai Penasihat Negara Dewan Negara serta Menlu RRT. Kerjasama ini menjadi cerminan dari upaya kedua negara untuk mewujudkan kerja sama pragmatis dan pendekatan yang lebih koheren dalam mengatasi tantangan pada masa pandemi dan pasca pandemi. Malaysia juga melabeli upaya dalam mengatasi pandemi Covid-19 dengan RRT merupakan sebuah bentuk diplomasi sains (MOFA, 2020).

Kebijakan luar negeri yang menghasilkan perjanjian tersebut, memuat pula pemberian akses prioritas ke vaksin Covid-19 yang dikembangkan oleh RRT, berbagi pengetahuan dan keahlian serta memfasilitasi kemampuan ilmiah dan teknologi untuk memajukan pengembangan vaksin di kedua negara. Kedua negara juga akan mendukung partisipasi sektor publik dan swasta mereka termasuk universitas, institusi, masyarakat dan organisasi dalam proyek kolaborasi bersama. Kesepakatan tersebut juga memuat komitmen kedua negara dalam jangka waktu awal lima tahun kedepan dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu selanjutnya masing-masing satu tahun, jika kedua negara sepakat untuk melakukan perpanjangan. Kesepakatan penyediaan vaksin dengan RRT juga berisikan poin untuk mendukung dan mendorong perusahaan dari masing-masing negara untuk

menjalin kerja sama menyeluruh dalam penelitian dan pengembangan (*Research & Development/R&D*) dan pasokan vaksin (MOFA, 2020).

Kebijakan luar negeri Malaysia tersebut menunjukkan kesesuaian dengan keyakinan bahwa kebijakan luar negeri negara bertujuan untuk memenuhi kondisi arena internasional (Ahmed, 2020: 788), guna meminimalisir efek buruk yang mungkin terjadi di masa depan. Dengan durasi lima tahun yang tergolong panjang maka kebijakan tersebut dapat dianggap sebagai langkah yang *sustainable* dan sangat menguntungkan Malaysia. Sehingga wajar saja jika Duta Besar Malaysia untuk RRT, Raja Nushirwan Zainal Abidin meyakini bahwa kerjasama ini adalah ekspresi lain dari hubungan historis yang sangat baik antara kedua negara (Xiaoci & Wenting, 2020).

Sementara itu, Indonesia melindungi warga negara melalui pemulangan/repatriasi dan vaksinasi WNI menjadi prioritas nomor kedua. Kemlu RI meningkatkan koordinasi untuk mempercepat pemulangan lebih dari 120.000 orang Indonesia dari lima puluh tiga negara dari akhir Januari hingga Juli 2020 (Fitriani, 2021). Dalam konteks penyediaan vaksin, Indonesia menunjukkan upaya yang gigih dalam mendapatkan suplai vaksin bagi masyarakat dengan melakukan pendekatan kepada produsen vaksin diantaranya Uni Emirat Arab, RTT, dan Inggris. Hasilnya, pemerintah Indonesia mengamankan pasokan hingga 340 juta dosis vaksin Covid-19 dari RRT dan Uni Emirat Arab dimana Indonesia diberikan pasokan awal dengan jumlah 30 juta dosis (Tambun, 2020).

Rangkaian kebijakan luar negeri tersebut bisa dinilai sebagai kelanjutan politik domestik dengan cara lain (Hudson, 2014: 141), dimana ketidakmampuan untuk memproduksi vaksin secara mandiri merupakan kelanjutan dari kebijakan domestik yang kecil kemungkinan untuk diarahkan pada inovasi, yang ditindaklanjuti dengan kebijakan luar negeri untuk menjamin provisi bagi material publik tersebut melalui jalinan kerjasama dengan mitra eksternal. Di sisi lain hal ini menunjukkan bahwa memang Indonesia belum dapat benar-benar lepas dari dependensi kepada negara lain.

Indonesia bukan tanpa upaya untuk menggalang kemampuan untuk mandiri. Negara tersebut menjadi negara Asia Tenggara pertama yang bergabung dengan Uji Solidaritas WHO dalam mengembangkan vaksin Covid-19, dengan dua puluh dua rumah sakit yang berpartisipasi untuk melakukan pengujian klinik terhadap 4 alternatif terapi yang sudah dilakukan selama ini, yaitu remdesivir, gabungan lopinavir/ritonavir, gabungan lopinavir/ritonavir ditambah interferon ($\beta 1b$), dan chloroquine (Kemkes RI, 2021). Riset ini dilaksanakan untuk mendapatkan bukti klinis yang lebih kuat dan valid terhadap efektifitas dan keamanan terbaik dalam perawatan pasien Covid-19 dan didesain secara khusus untuk mempersingkat waktu yang diperlukan untuk menghasilkan bukti yang kuat terhadap keempat alternatif terapi tersebut tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip *Good Clinical Practice* (GCP) atau Cara Uji Klinis yang Baik (CUKB).

Awalnya Indonesia memilih untuk bergabung dalam *Solidarity Trial* yang berfokus pada pengujian remdisivir secara klinis. Namun pembahasan lebih lanjut dengan WHO membuat Indonesia yakin dan siap untuk berpartisipasi pada keseluruhan alternatif terapi yang dikembangkan oleh WHO (Kemkes RI, 2021).

Indonesia juga terlibat dalam uji klinis kandidat vaksin Covid-19 yang dikembangkan oleh Sinovac Biotech RRT. Uji coba ini dilaksanakan di kota Bandung, Jawa Barat dan melibatkan sedikitnya 1.600 relawan untuk kedepannya memastikan bahwa perusahaan farmasi milik negara Bio Farma, dapat memproduksi 100 juta dosis vaksin RRT jika uji klinis tersebut sukses. Inisiatif kebijakan ini bisa dilihat sebagai upaya yang didorong oleh kewajiban untuk memenuhi International Health Regulations (IHR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia sejak tahun 2007 (Kemkes RI, 2021). Kebijakan ini juga bisa dilihat sebagai cerminan bahwa kebijakan pemerintah yang berwenang terhadap lingkungan internasional benar-benar didasari adanya kepentingan dan tujuan nasional yang disesuaikan dengan nilai (Webber & Smith, 2002: 11-12) yang telah dibentuk dalam dunia internasional yang dalam hal ini adalah kewajiban untuk menunjung tinggi komitmen terhadap IHR.

Baik Malaysia maupun Indonesia juga terlihat memperhatikan perkembangan vaksin buatan Rusia Sputnik V yang sebelumnya diberikan sebagai bentuk bantuan kepada Filipina (80.000 dosis), Vietnam (1000 dosis), dan Laos (besaran dosis tidak dibuka kepada publik) yang kemudian berkembang ke transaksi penjualan dan produksi vaksin tersebut. Malaysia dan Indonesia kemudian mengumumkan juga rencana untuk membeli Sputnik V langsung dari pemerintah Rusia, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan kesepakatan mengenai bentuk kerja sama berupa produksi, pelaksanaan uji klinis. Indonesia bahkan segera mengutus beberapa pihak untuk berkomunikasi dengan Russian Direct Investment Fund (RDIF) terkait upaya kerja sama tersebut (Sentosa, 2020). Meskipun sebenarnya vaksin Sputnik V kurang mendapat dukungan dari WHO dalam pengembangannya (Murphy, 2021), upaya kedua negara dalam menyediakan vaksin tersebut juga menunjukkan bahwa memang keduanya merupakan negara yang memiliki defisit kronis dan tergolong *chronic deficit countries* terhadap vaksin.

Pendekatan yang dilakukan kedua negara kepada negara produsen vaksin dapat dianggap berhasil karena dengan adanya kerangka kerjasama yang disepakati, keduanya menjadi prioritas negara penerima dari vaksin yang dibuat oleh RRT sebagai salah satu pelopor dalam pengembangan vaksin Covid-19 (Nakano, 2020) (Azizah, 2020). Kebijakan luar negeri kedua negara juga menjadi langkah yang mendahului skema global pendistribusian vaksin yang dipimpin WHO. Namun, fakta bahwa akses terhadap ketersediaan dan produksi vaksin Cina, Sinovac dan Sinopharm yang termasuk ke dalam vaksin yang disetujui oleh WHO (Putri, 2021), ternyata belum cukup efektif untuk mengatasi permasalahan lainnya, yakni eksepsi dari beberapa negara di dunia terhadap individu yang menggunakan dosis penuh dari vaksin tersebut. Hambatan ini tentu membuat kedua negara perlu melakukan recalibrasi guna mempercepat upaya penanganan pandemi, yang kemudian berimplikasi dengan kegiatan perekonomian yang dijadikan sebagai fokus utama kebijakan luar negeri kedua negara tersebut.

- **Kebijakan Luar Negeri**

Upaya kebijakan luar negeri yang lebih sering berada pada cakupan bilateral dan bukan menuju kepada upaya multilateral yang menjadi upaya kolektif dalam

penanganan pandemi, juga merupakan isu yang melanda sistem internasional secara menyeluruh (B.K.S.A.P, 2020). Fenomena ini seharusnya dapat menjadi pijakan bagi pemikiran liberal yang mengedepankan kerjasama dan tindakan bersama untuk terwujud. Namun, sepertinya dunia benar-benar menunjukkan sifat aslinya bahwa memang pemikiran tentang langkah kolektif hanya memungkinkan untuk muncul ketika negara sebagai unit dalam sistem yang ada merasa bahwa upaya *self-help* yang dilakukan terlebih dulu memenuhi kepentingan yang dimiliki.

Pandemi Covid-19 bisa dianggap sebagai katalis dari perburukan kondisi ekonomi politik global yang kemudian berdampak pada krisis tatanan internasional pasca perang dingin menuju kepada tatanan yang liberal (Babić, 2021). Distorsi sosial ekonomi akibat pandemi membuat kebijakan luar negeri yang merupakan hasil interaksi antara pengambil keputusan negara dengan lingkungan yang dihadapi (Ahmed, 2020: 787) menjadi sesuatu yang perlu untuk terus disesuaikan. Tidak mengherankan jika upaya *refocusing* menjadi pilihan bagi Indonesia dan Malaysia yang dengan keterbatasan kemampuan yang dimiliki dalam penanganan pandemi terus menerus menekankan kebutuhan akan kepemimpinan global kolektif yang kuat.

Indonesia melalui Menlu Retno juga menyampaikan jargon *Recover Together, Recover Stronger* (Kemlu RI, 2021) yang diharapkan akan menjadi suara yang membuka mata internasional bahwa upaya mandiri hanya akan berujung pada ketidaksetaraan dan proses *recovery* yang kurang optimal. Meskipun isolasi dalam penanganan pandemi benar dibutuhkan, kegagalan bekerja sama dengan negara lain akan mengurangi kemampuan negara dalam menghadapi dampak wabah Covid-19. Aspek ekonomi yang perlu penanganan kolektif melalui kerja sama dengan negara lain tentu akan ditentukan oleh seberapa besar kepercayaan asing dapat diperoleh dari penanganan dan upaya mandiri yang dilakukan suatu negara dalam menangani ancaman kesehatan yang terjadi.

Maximal profit or value yang menjadi tujuan dari diambilnya kebijakan luar negeri suatu negara pada dasarnya benar-benar bergantung pada pendekatan dan sikap dari kedua negara dalam memaknai kondisi pandemi. Respons publik di Indonesia dan Malaysia memiliki sifat yang sama untuk menyalahkan orang lain atas pandemi perkembangan Covid-19 di negara mereka tentu memberikan beban lebih besar bagi perumusan kebijakan luar negeri yang harus berjalan beriringan dengan kepentingan ekonomi yang dimiliki. Publik Indonesia yang mempercayai bahwa virus Covid-19 masuk ke Indonesia karena kebijakan pemerintah yang lemah terhadap pekerja dan turis RRT, dan publik Malaysia yang menyalahkan sekelompok peziarah Muslim untuk pertemuan keagamaan besar (Idris & Jalli, 2020) tentu menjadi preseden buruk yang membuat negara lain memikirkan ulang untuk membuka pintu kerjasama.

Dari sini bisa dipahami bahwa percepatan pembangunan sosial dan ekonomi serta memperkuat *bargaining position* di dunia menjadi salah satu prinsip utama yang ada dalam agenda kebijakan luar negeri kedua negara. Namun jika menilik penyangkalan elit politik Indonesia terhadap ancaman pandemi, kecemasan ekonomi, serta dampak desentralisasi dan tumpang tindih kewenangan, membuat negara Indonesia terjebak dalam respons kebijakan yang terbilang lesu dan kurang

responsif (Ahmed, 2020: 788). Kondisi sebaliknya justru dialami Malaysia yang dalam perkembangannya menciptakan kebijakan efektif dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan di atas masalah politik dan ekonomi (Johnson, 2021) yang berpotensi dihadapi di kemudian hari.

SIMPULAN

Dari keseluruhan pembahasan maka bisa dirumuskan kesimpulan bahwa argumentasi mengenai tujuan kedua negara untuk menjadi yang terdepan dalam memulai kembali aktivitas ekonomi global melalui diplomasi ekonomi yang aktif merupakan sesuatu yang benar dilakukan. Pendekatan dan sikap dari kedua negara yang terbilang sangat kontras dalam memaknai kondisi pandemi, menimbulkan kekhawatiran bahwa langkah penyesuaian Indonesia tidak akan menjadi langkah yang *sustainable* jika dibandingkan dengan langkah penyesuaian yang telah dilakukan oleh Malaysia, belum lagi kebijakan luar negeri yang diambil juga bisa dianggap sebagai produk dari konflik kepentingan dalam pemerintahan domestik Indonesia.

Aspek pendekatan dan sikap, yang peneliti anggap sebagai faktor kunci untuk segera keluar dari pandemi dan mengembalikan fokus kebijakan luar negeri kepada tujuan masing-masing negara untuk terus berkembang dalam bidang ekonomi juga sejauh ini dapat dikatakan menempatkan Malaysia pada posisi lebih unggul karena kesiapsiagaan yang ditunjukkan sejak awal pandemi Covid-19 melanda negara mereka.

Kesigapan tersebut menciptakan tingkat kepercayaan yang tinggi bagi publik domestik, maupun pihak asing yang akan berinvestasi, penyediaan vaksin yang berlangsung dalam periode panjang juga menunjukkan bahwa Malaysia memang berkomitmen besar untuk mengatasi pandemi bersama RRT yang dianggap sebagai mitra utama mereka dalam penyediaan vaksin. Sementara itu keleluasaan bagi aktivitas ekonomi yang disediakan oleh Indonesia, menurut peneliti memiliki potensi untuk memperpanjang durasi dari pandemi dan menekan efektifitas vaksin yang hingga saat ini belum menunjukkan keampuhannya dalam menghadapi *strain virus* yang terus berkembang. Oleh karena itu, selain *refocusing* kebijakan luar negeri, Indonesia juga harus menetapkan pendekatan sigap didalam negeri dan juga melepas isolasi/pembatasan yang dilakukan secara bertahap. Dengan demikian penurunan kepercayaan signifikan dari investor-investor yang menjadi roda penggerak bagi geliat perkembangan ekonomi Indonesia senantiasa dapat dihindari.
(*)

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. (2020, March 11). "Kikuknya" Menkes Terawan Menghadapi COVID-19. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/kikuknya-menkes-terawan-menghadapi-covid-19-eD3a>
- Adelson, L. (2020, April 14). *Hatred going viral in 'dangerous epidemic of misinformation' during COVID-19 pandemic*. Retrieved from UN News: <https://news.un.org/en/story/2020/04/1061682>
- Ahmed, J. (2020). The Theoretical Significance of Foreign Policy in International Relations-an Analyses. *Journal of Critical Reviews Vol. 7 Issue. 2*, Advance Scientific Research.
- Alden, C., & Aran, A. (2017). *Foreign Policy Analysis: New approaches*. London: Routledge.
- Ariyanti, H. (2020, October 15). *WHO Puji Penanganan Covid-19 Malaysia*. Retrieved from Merdeka.com: <https://www.merdeka.com/dunia/who-puji-penanganan-covid-19-malaysia.html?page=2>
- AS, B. (2018). The Study of Foreign Policy in International Relations. *Journal of Political Sciences & Public Affairs Vol. 6 No. 4*.
- Azizah, K. N. (2020, September 30). *Indonesia Masuk Daftar Prioritas Negara Penerima Vaksin China*. Retrieved from Detik.com: <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5193681/indonesia-masuk-daftar-prioritas-negara-penerima-vaksin-china>
- B.K.S.A.P. (2020, November 20). *Multilateralisme Dibutuhkan di Tengah Pandemi*. Retrieved from dpr.go.id: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30732/t/Multilateralisme+Dibutuhkan+di+Tengah+Pandemi>
- Babić, M. (2021). The COVID-19 Pandemic and the Crisis of the Liberal International Order: Geopolitical Fissures and Pathways to Change. *Global Perspectives*, 2(1). doi:doi.org/10.1525/gp.2021.24051
- Basith, A. (2020, January 27). *Virus corona menyebar, Indonesia tak akan batasi kedatangan turis asal China*. Retrieved from Kontan.co.id: <https://nasional.kontan.co.id/news/virus-corona-menyebar-indonesia-tak-akan-batasi-kedatangan-turis-asal-china>
- Beteringhe, A., Pieptea, M.-C., Arsith, M., & Stanciu, F. (2020). Covid-19 Impact on International Relations. *International Relations in the Contemporary World. Geopolitics and Diplomacy*, 249-255.

- Borneo Post. (2020, January 25). *First coronavirus cases in Malaysia: 3 Chinese nationals confirmed infected, quarantined in Sungai Buloh Hospital*. Retrieved from Borneo Post Online: <https://www.theborneopost.com/2020/01/25/first-coronavirus-cases-in-malaysia-3-chinese-nationals-confirmed-infected-quarantined-in-sungai-buloh-hospital/>
- Burry, L. D., Barletta, J. F., Williamson, D., Kanji, S., Maves, R. C., Dichter, J., . . . Erstad, B. L. (2020). It takes a village: contending with drug shortages during disasters. *Chest*, 158(6), 2414-2424. doi:10.1016/j.chest.2020.08.015
- Fitriani. (2021, October 26). *Indonesia's Foreign Policy and the COVID-19 Pandemic*. Retrieved from Thinkglobalhealth.org: <https://www.thinkglobalhealth.org/article/indonesias-foreign-policy-and-covid-19-pandemic>
- Grint, K. (2020, May 15). *The World Turned Upside Down*. Retrieved from ilaglobalnetwork.org: https://ilaglobalnetwork.org/the-world-turned-upside-down/?gclid=CjwKCAjwq9mLBhB2EiwAuYdMtayzBfye2C0oKQzPPjyKXyxDTkdLE9OCnbIkCDo-TGzOIPsR6CYQcxoCqIkQAvD_BwE
- Hamzah, N. M., Yu, M.-M., & See, K. F. (2020). Assessing the efficiency of Malaysia health system in COVID-19 prevention and treatment response. *Health Care Management Science*, 1-13.
- Hudson, V. M. (2014). *Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory*. Lanham: Rowman & Littlefield.
- Idris, I. K., & Jalli, N. (2020, April 28). *How blaming others dominates Indonesian and Malaysian twitterspheres during COVID-19 pandemic*. Retrieved from The Conversation: <https://theconversation.com/how-blaming-others-dominates-indonesian-and-malaysian-twitterspheres-during-covid-19-pandemic-136193>
- Indonesia.go.id. (2020, March 2). *Kasus Covid-19 Pertama, Masyarakat Jangan Panik*. Retrieved from Indonesia.go.id: <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kasus-covid-19-pertama-masyarakat-jangan-panik>
- ISIS Malaysia. (2021, September 8). *ISIS.Forum : Adapting to Covid-19:Malaysian foreign policy priorities for the new world*. Retrieved from Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=3ND5fE-xMJM&ab_channel=ISISMALAYSIA
- Jelita, I. N. (2020, October 18). *RI–Singapura Sepakati Travel Corridor Arrangement, Ini Alurnya*. Retrieved from Media Indonesia:

<https://mediaindonesia.com/ekonomi/353760/risingapura-sepakati-travel-corridor-arrangement-ini-alurnya>

Johnson, R. S. (2021, January 1). A comparison of Indonesia and Malaysia's COVID-19 public health. *Citizenship, Rights, and Cultural Belonging Working Paper Series*, pp. 2-17.

Kahler, M. (1998). *International Organization*, 52(4), 919–941.

Kemkes RI. (2021, January 19). *IHR Cegah Penyebaran Penyakit Antar Negara*. Retrieved from Kemkes.go.id: <https://www.kemkes.go.id/article/print/1379/ihr-cegah-penyebaran-penyakit-antar-negara.html>

Kemkes RI. (2021, Januari 20). *Indonesia Ikut Solidarity Trial WHO untuk Covid-19*. Retrieved from sehatnegeriku.kemkes.go.id: <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20200330/2133535/indonesia-ikut-solidarity-trial-who-covid-19/>

Kemlu RI. (2020, June 11). *Diplomasi Ekonomi di Tengah Pandemi*. Retrieved from Kemlu.go.id: <https://kemlu.go.id/phnompenh/id/news/7079/diplomasi-ekonomi-di-tengah-pandemi>

Kemlu RI. (2020, April 22). *Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Terkait Wabah COVID-19*. Retrieved from Kemlu.go.id: <https://kemlu.go.id/brussels/id/news/6349/kebijakan-pemerintah-republik-indonesia-terkait-wabah-covid-19>

Kemlu RI. (2020, July 29). *Travel Corridor Arrangement*. Retrieved from Kemlu.go.id: https://kemlu.go.id/portal/id/list/halaman_list_lainnya/132/travel_corridor_arrangement

Kemlu RI. (2021, January 6). *Menlu RI sampaikan capaian politik luar negeri Indonesia 2020 dan prioritas diplomasi 2021*. Retrieved from Kemlu.go.id: <https://kemlu.go.id/manama/id/news/10500/menlu-ri-sampaikan-capaian-politik-luar-negeri-indonesia-2020-dan-prioritas-diplomasi-2021>

Kemlu.go.id. (2021, Januari 6). *Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Tahun 2021*. Retrieved from Kemlu.go.id: <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2048/berita/ Pernyataan-pers-tahunan-menteri-luar-negeri-tahun-2021>

Khoerunisa, N., & Noorikhshan, F. F. (2021). Perbandingan Tata Kelola Penanganan Pandemi Covid 19 di Indonesia dan India. *Journal of Political Issues Vol. 2 No.2*, 89-101.

- Kluth, A. (2020, March 31). *From Orban to Kaczynski, Wannabe Autocrats Love the Pandemic*. Retrieved from Washington Post: https://www.washingtonpost.com/business/from-orban-to-kaczynski-wannabe-autocrats-love-the-pandemic/2020/03/30/4dd7a89a-72a7-11eaad9b254ec99993bc_story.html
- Legido-Quigley, H., & Asgari-Jirhandeh, N. (2018). *Resilient and People-Centred Health Systems: Progress, Challenges and Future Directions in Asia*. New Delhi: WHO Regional Office.
- Lidwina, A. (2020, April 13). *Berapa Jumlah Ketersediaan dan Kebutuhan Ventilator di Indonesia?* Retrieved from Katadata.co.id: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/04/14/berapa-jumlah-ketersediaan-dan-kebutuhan-ventilator-di-indonesia>
- Limanseto, H. (2021, August 4). *Menko Airlangga: Menghadapi Pandemi Covid-19, Butuh Solidaritas Antar Negara*. Retrieved from ekon.go.id: <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3193/menko-airlangga-menghadapi-pandemi-covid-19-butuh-solidaritas-antar-negara>
- Lu, J. (2020). Themes and Evolution of Misinformation During the Early Phases of the COVID-19 Outbreak in China—An Application of the Crisis and Emergency Risk Communication Model. *Front. Commun*, 5(57). doi:doi:10.3389/fcomm.2020.00057
- Lumbanrau, R. E. (2020, April 20). *Virus corona: Trump akan sediakan ventilator untuk Indonesia, saat kematian di AS melonjak 3.000 sehari, sementara netizen protes karena kebutuhan di dalam negeri tak cukup*. Retrieved from BBC News: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52356636>
- Makarim, A. Z. (2020, May 20). *Covid-19, Malaysia, dan Indonesia*. Retrieved from Detik.com: <https://news.detik.com/kolom/d-5022570/covid-19-malaysia-dan-indonesia>
- Markwat, T., Kole, E., & Van Dijk, D. (2009). Contagion as a Domino Effect in Global Stock Markets. *Journal of Banking and Finance*, 1996-2012.
- Mas'udi, W., & Winarti, P. S. (2020). *Tata Kelola Penanganan Covid-19 Di Indonesia Kajian Awal*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- MIDA. (2020, February). *Is Malaysia Ready in the Ventilator Production as Demand Surge During Covid-19 Pandemic?* Retrieved from Mida.gov.my: <https://www.mida.gov.my/is-malaysia-ready-in-the-ventilator-production-as-demand-surge-during-covid-19-pandemic/>

- Modelski, G. (1962). *A Theory of Foreign Policy*. Princeton: Frederick A. Praeger.
- MOFA. (2020, November 18). *Malaysia and The People's Republic of China Sign Agreement to Deepen Cooperation in Vaccine Development and Accessibility*. Retrieved from kln.gov.my: <https://www.kln.gov.my/web/guest/-/malaysia-and-the-people-s-republic-of-china-sign-agreement-to-deepen-cooperation-in-vaccine-development-and-accessibility>
- MOFA. (2021, August 5). *Participation of Yb Senior Minister of Foreign Affairs At the International Forum on Vaccine Cooperation 5 August 2021*. Retrieved from Kln.go.my: <https://www.kln.gov.my/web/guest/-/participation-of-yb-senior-minister-of-foreign-affairs-at-the-international-forum-on-vaccine-cooperation-5-august-2021>
- Moisescu, O. I. (2016). *Tourism Economy*. Babes: Bolyai University.
- Moravcsik, A. (1997). Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics. *International Organization Vol 51. Issue. 4*, 513-553.
- Morin, J.-F., & Paquin, J. (2018). *Foreign Policy Analysis: A Toolbox*. New York: Palgrave Macmillan.
- Murphy, M. (2021, September 21). *Russia's New Frontier in Southeast Asia: Vaccine Diplomacy*. Retrieved from CSIS.org: <https://www.csis.org/blogs/new-perspectives-asia/russias-new-frontier-southeast-asia-vaccine-diplomacy>
- Nakano, T. (2020, October 14). *Malaysia promised priority access to China's COVID vaccine*. Retrieved from Nikkei Asia: <https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Malaysia-promised-priority-access-to-China-s-COVID-vaccine>
- New Straits Times. (2020, Februari 3). *Health Ministry rejects claim of being 'late' in tackling coronavirus crisis*. Retrieved from New Straits Times: <https://www.nst.com.my/news/nation/2020/02/562044/health-ministry-rejects-claim-being-late-tackling-coronavirus-crisis>
- Park, C.-Y., Kim, K., Roth, S., Beck, S., Kang, J. W., Tayag, M. C., & Griffin, M. (2020). *Global Shortage of Personal Protective Equipment amid COVID-19: Supply Chains, Bottlenecks, and Policy Implications*. Manila: Asian Development Bank.
- Pranita, E. (2020, March 11). *Diumumkan Awal Maret, Ahli: Virus Corona Masuk Indonesia dari Januari*. Retrieved from Kompas.com:

- <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari?page=all>
- Putri, G. S. (2021, January 27). *6 Vaksin yang Akan Disetujui WHO, dari AstraZeneca hingga Sinovac*. Retrieved from Kompas.com: <https://www.kompas.com/sains/read/2021/01/27/130000623/6-vaksin-yang-akan-disetujui-who-dari-astrazeneca-hingga-sinovac?page=all>
- Rosenau, James N. 1980. *The Scientific Study of Foreign Policy*. New York: The Free Press.
- Sentosa, I. (2020, November 30). *Indonesia-Rusia: Vaksin Sputnik V hingga Kerja Sama Pasca-pandemi*. Retrieved from Kompas.com: <https://www.kompas.id/baca/internasional/2020/11/30/indonesia-rusia-vaksin-sputnik-v-hingga-kerja-sama-pasca-pandemi/>
- Setyowati, H. E. (2020, April 6). *Indonesia Perkuat Kerja Sama Bilateral dengan Korsel dalam Penanganan Pandemi Covid-19*. Retrieved from Ekon.go.id: <https://ekon.go.id/publikasi/detail/214/indonesia-perkuat-kerja-sama-bilateral-dengan-korsel-dalam-penanganan-pandemi-covid-19>
- Sudarwan, I. A. (2020, April 6). *Darurat! Indonesia Kekurangan Ventilator, Wamen BUMN Minta Bantuan Elon Musk*. Retrieved from Bisnis.com: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200406/9/1223006/darurat-indonesia-kekurangan-ventilator-wamen-bumn-minta-bantuan-elon-musk>
- Suryadarma, D. (2020). *Assessment of Socioeconomic Impact of COVID-19 on Household in Indonesia*. Jakarta: Smeru Research Institute.
- Tambun, L. T. (2020, August 24). *Indonesia Says China, UAE Agree to Supply Up to 370 Million Doses of Covid-19 Vaccine*. Retrieved from Jakarta Globe: <https://jakartaglobe.id/news/indonesia-says-china-uae-agree-to-supply-up-to-370-million-doses-of-covid19-vaccine/>
- Webber, M., & Smith, M. (2002). *Foreign Policy in Transformed World*. London: Prentice Hall.
- Webber, M., & Smith, M. (2002). *Foreign Policy in a Transformed World*. Essex: Pearson Education Limited.
- Woetzel, J., Seong, J., Leung, N., Ngai, J., Manyika, J., Madgavkar, A., . . . Mironenko, A. (2019). *China and the World: Inside the Dynamics of a Changing Relationship*. Pennsylvania: Mckinsey Global Institute.

Xiaoci, D., & Wenting, X. (2020, October 12). *Sharing vaccine with Malaysia highlights 'historic friendship': ambassador to China*. Retrieved from Global Times: <https://www.globaltimes.cn/content/1203224.shtml>

Yunus, F., & Andarini, S. (2020). Letter from Indonesia. *Respirology*, 25(12), 1328-1329. doi:10.1111/resp.13953